

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh)

Lisa Amelia Herman<sup>(1)</sup>, Daswirman<sup>(2)</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Perbankan dan Pembangunan  
[lisa.ameliaherman@gmail.com](mailto:lisa.ameliaherman@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aimed to test: 1) Effect of implementation of financial management information system to quality LKPD, 2) Effect of human resource competencies to quality LKPD, and 3) Influence of Role SPIP to quality LKPD. This type of research is classified at the research be cuantitatife. The population in this study is 10 work units (SKPD) in Payakumbuh. Selection of the sample with purposive sampling method, the total respondents is 100. The data used in this study of primary data. Data collection techniques with engineering survey by distributing questionnaires to Employees Finance, General and Human Resources, Division of Program and Admin SIPKD. The analytical method used is multiple regretions analysis with SPSS. The research proves that 1) Implementation of Financial Management Information System positive significant effect on the quality of LKPD where significant value.  $\beta$  coefficient value in the variable X1 is positive which means that (H1 accepted). 2) HR Competency positive significant effect on the quality of LKPD where significant value.  $\beta$  coefficient value in the variable X2 is positive which means that (H2 accepted). 3) SPIP positive significant effect on the quality of LKPD where significant value.  $\beta$  coefficient value in the variable X3 is positive which means that (H3 accepted).*

**Keywords:** Application SIPKD, HR Competency, Role SPIP, Quality LKPD

---

*Detail Artikel:*

*Diterima : 28 Agustus 2017*

*Disetujui : 14 Oktober 2017*

---

### PENDAHULUAN

Suatu pemerintahan daerah kota atau kabupaten dikepalai oleh seorang Walikota atau Bupati yang terpilih dan mempunyai masa tugas selama periode tertentu. Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditaati yaitu memberikan laporan penyelenggaraan kepada pemerintah pusat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Walikota satu kali dalam satu tahun. UU Nomor 17 Tahun 2003 mengisyaratkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan

kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggung jawaban penggunaan anggaran dari pemerintah.

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal, dan melalui penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara langsung akan menghasilkan keandalan pelaporan keuangan daerah (Indriasari & Nahartyo, 2008). Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada dibawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (*auditabel*).

Secara umum sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi perusahaan dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk pihak di luar perusahaan.

Menurut Susanto (2013:22), “Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. Selanjutnya menurut Sutarmanto (2009:5) “Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama”. Dan menurut Jogiyanto (2009:34) “sistem didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen”.

Sistem dan prosedur merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Suatu sistem baru bisa terbentuk bila didalamnya terdapat beberapa prosedur yang mengikutinya. Menurut Mulyadi (2007:5) “Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang”. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan bagian-bagian atau sub sistem-sub sistem yang disatukan dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan.

Widodo (2001) (dalam Kharis, 2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut

beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam (Alimbudiono, Sandra, & Andono, 2004), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. *Skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” Dan menurut Agung (2008) “Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.”

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), kompetensi sumber daya manusia, peran sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Penelitian Indriasari & Nahartyo (2008) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana

volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks.

Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dibuktikan dengan penelitian Yosefrinaldi (2013) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dimana, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H1 : Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati, dkk., (2014) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Ini berarti semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Indriasari & Nahartyo (2008) membuktikan dalam penelitiannya bahwa kapasitas sumberdaya berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka peranan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan daerah Kota Payakumbuh.

H2 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh.

### **Pengaruh Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Berdasarkan penelitian Kartika & Budiono (2015) SPIP pada satuan kerja unit organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan rata-rata tanggapan responden, berada pada katagori “Baik” dengan nilai sebesar 82,94%. Hal ini berarti sistem pengendalian internal pemerintah dalam satuan kerja pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah berjalan dengan baik, yaitu dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Indriasari & Nahartyo (2008) membuktikan secara empiris bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap nilai LKPD yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan LKPD.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud untuk menguji kembali hubungan antara peran SPIP dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

H3 : Peran SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menekankan pada penelusuran data-data, literatur, dan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari tipologinya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif-kuantitatif, dimana penulis akan melakukan penyebaran kuesioner yang bertujuan mendapatkan hasil yang ada dan mengevaluasi tentang laporan keuangan pemerintah Kota Payakumbuh dengan berpedoman pada Undang-undang, dan menemukan alternatif penyelesaian masalah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Payakumbuh telah menerapkan SIPKD serta telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang diadopsi dari kuisisioner penelitian yang dilakukan oleh Soimah (2014). Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, dokumentasi, hasil penelitian terdahulu, instansi / lembaga terkait seperti Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPPKA), Inspektorat dan sumber lainnya yang relevan.

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan/pegawai bagian keuangan/akuntansi, bagian program, bagian kepegawaian dan umum serta admin/operator SIKPD di 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Payakumbuh. Sampel penelitian adalah dinas/badan yang mempunyai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang nilainya terbaik. Responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 100 orang pegawai yang bertugas pada masing-masing SKPD sampel yang mempunyai tugas dan jabatan masing masing. Untuk mengukur pendapat responden digunakan lima point skala Likert, dengan skala seperti tertera dalam tabel berikut;

**Tabel 1**  
**Skala Pengukuran Variabel**

No	Jenis	Poin
1	Tidak Pernah (TP)	1
2	Jarang Sekali (JS)	2
3	Kadang Kadang (KK)	3
4	Sering (S)	4
5	Sangat Sering (SS)	5

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang diteliti, yaitu; variabel independen (bebas) yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), kompetensi sumber daya manusia dan peran sistem pengendalian internal pemerintah dan untuk variabel dependen (terikat) adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Alat analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan Software SPSS (*Statistical Package For Social Science*). Analisis regresi berganda menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien korelasi
- X1 = Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- X2 = Kapasitas Sumber Daya Manusia
- X3 = Peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- e = variabel lain yang mempengaruhi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Payakumbuh adalah salah satu daerah setingkat kabupaten/kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Pembentukan Pemerintah Kota Payakumbuh ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19).

Dalam hasil penelitian, teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah koefisien korelasi *Pearson Correlation*. Data dikatakan valid jika total setiap konstruksinya signifikan pada level 0.05 atau 0.01. Hasil pengujian validitas dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut;

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Person Correlation (Validitas)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (x1)	0.629** – 0.781**	0.000 – 0.000	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (x2)	0.635** – 0.874**	0.000 – 0.000	Valid
Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (x3)	0.478** – 0.789**	0.000 – 0.000	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (y)	0.617** – 0.816**	0.000 – 0.000	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Hasil uji validitas diatas menunjukkan *Pearson Correlation* untuk setiap variabel yaitu, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) signifikan pada tingkat signifikansi 0.05 atau 0.01. Dengan demikian disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner mampu untuk mengukur variabel yang diharapkan.



Sedangkan uji reliabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ). Jika nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0.70$  maka data dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha ( $\alpha$ )	Keterangan
Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (x1)	0.816	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (x2)	0.906	Reliabel
Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (x3)	0.879	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (y)	0.887	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ) untuk setiap variabel adalah lebih besar dari 0.70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan untuk masing-masing variabel dikatakan reliabel.

Untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2), dan Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) dengan variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) digunakan model regresi berganda.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Koefisien regresi	t Statistik	Sig.
<i>Constant</i>	8.013	2.519	0.014
Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (x1)	0.293	2.768	0.007
Kompetensi Sumber Daya Manusia (x2)	0.228	3.205	0.002
Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (x3)	0.406	4.375	0.000
<i>Adjusted R Square</i>	0.542		
F Hitung	32.109		
Sig	0.000		

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 2 diatas, dilihat bahwa F hitung sebesar 32.109 dengan angka signifikansi = 0.000. Karena nilai signifikansi dari data analisis lebih kecil dari 0.05 maka dapat diartikan bahwa model penelitian ini adalah layak atau dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, peran sistem pengendalian internal pemerintah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0.542 yang berarti bahwa 54.2% variasi besarnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variasi penerapan sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, peran sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 45.8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Dari hasil analisis diatas, terlihat bahwa nilai koefisien dari variabel independen penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X1) bernilai positif yaitu 0.293 dengan nilai signifikan bernilai 0.007 ( $< 0.05$ ). Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah” **diterima**. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

Nilai koefisien variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) bernilai positif sebesar 0.228 dengan nilai signifikan 0.002 atau nilai signifikan  $< 0.05$ . Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah” **diterima**. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

Hasil variabel peran sistem pengendalian intern pemerintah (X3) bernilai positif sebesar 0.406 dengan nilai signifikan 0.000 atau nilai signifikan  $< 0.05$ . Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “peran sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah” **diterima**. Dari hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa peran sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

### **Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dengan koefisien regresi 0.293 atau 29.3%. Artinya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dipengaruhi oleh sistem informasi yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan dan dalam pelaporan/penyusunan laporan keuangan.

Dengan kata lain penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang memanfaatkan teknologi komputer untuk dapat memproses dan menyimpan informasi, juga sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi memberi kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh.

Hasil ini sejalan dengan kebijakan yang telah dilaksanakan di kota Payakumbuh dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah seperti penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Payakumbuh yang telah diterapkan pemakaiannya pada setiap SKPD se-Kota Payakumbuh. Sistem ini memberi manfaat kepada pemerintah Kota Payakumbuh dalam menghasilkan laporan yang berkualitas.

Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa komputer merupakan alat yang dapat melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer



mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Indriasari & Nahartyo, 2008).

Variabel penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dilihat dari penggunaan komputer dan jaringan internet. Berdasarkan data jawaban responden, rata-rata responden menjawab sangat sering menggunakan komputer dalam melaksanakan tugasnya, terlihat dari distribusi frekuensi sebesar 4.61 dan kadang-kadang memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung dalam pengiriman informasi, dengan distribusi frekuensi sebesar 4.32. Hal ini berarti penggunaan komputer dan memanfaatkan jaringan internet dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Semakin baik penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Soimah (2014) yang meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dengan hasil pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Selanjutnya sejalan dengan penelitian Zuliarti (2012) tentang kapasitas pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus, dengan hasil Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Kabupaten Kudus.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Hal ini terlihat dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.228 atau 22.8%. Artinya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan dan dalam pelaporan/penyusunan laporan keuangan.

Hasil ini bersamaan dengan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Payakumbuh, seperti dalam hal menunjuk pegawai yang mempunyai kompetensi untuk mengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada setiap SKPD yang ada di Kota Payakumbuh yang selanjutnya disebut sebagai admin. Penunjukan admin tersebut dengan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh dan diperbaharui setiap tahunnya. Selanjutnya admin tersebut diberikan pelatihan-pelatihan rutin pada setiap tahunnya yang terkait dengan regulasi dan sistem yang baru.

Hasil ini sejalan dengan teori, bahwa kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau

individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Yosefrinaldi (2013) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Hal ini terlihat dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.406 atau 40.6%. Artinya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan keuangan atau dalam pelaporan/ penyusunan laporan keuangan.

Tingginya persentase pengaruh tersebut, beriringan dengan pelaksanaan pengendalian internal pemerintah Kota Payakumbuh seperti dengan dibentuknya Tim Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kota Payakumbuh yang berwenang untuk mengaudit, meriviu, mengevaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Hal lain adalah adanya review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang rutin dilakukan oleh Inspektorat, seterusnya adanya pendampingan untuk penyusunan LAKIP oleh Kemenpan dan RB, dan hasil ini terbukti juga dengan raihan hasil B untuk LAKIP Kota Payakumbuh tahun 2016.

Hal ini sesuai dengan teori bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dimaksudkan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Dengan begitu, maka penyelenggaraan keuangan atas kegiatan pemerintahan dapat mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yosefrinaldi (2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian, Yudianta & Erawati (2012) dengan hasil penelitiannya bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Zuliarti (2012) pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **KESIMPULAN**

1. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh, terlihat dengan koefisien regresinya sebesar 0.293 atau 29.3%. Artinya penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di Kota Payakumbuh telah memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Payakumbuh.

2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh dengan koefisien regresinya sebesar 0.228 atau 22.8%. Artinya, kompetensi sumber daya manusia di Kota Payakumbuh telah memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh dengan koefisien regresinya sebesar 0.406 atau 40.6%. Artinya, kompetensi peran pengendalian internal pemerintah di Kota Payakumbuh telah memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Payakumbuh.

### SARAN

1. Dari hasil analisis data dan pembahasan, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mendukung kualitas laporan keuangan daerah. Namun Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh disarankan untuk mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan penggantian perangkat komputer yang rusak atau usang untuk diganti dengan yang baru dan canggih agar lebih efisien dan efektif.
2. Dari hasil analisis data dan pembahasan, kompetensi sumber daya manusia mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, kompetensi sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan sehingga pemahaman terhadap peraturan dan standar penyusunan laporan keuangan lebih optimal dan dapat meningkatkan interaksi dengan sistem pengelola keuangan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tabel distribusi frekuensi kompetensi sumber daya manusia yang masih ada beberapa item pernyataan yang masih rendah. Selanjutnya pemerintah daerah disarankan agar dalam penempatan pegawai hendaknya menyesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki (*The right man on the right place*) dan kebutuhan organisasi
3. Dari hasil analisis data dan pembahasan, peran pengendalian internal pemerintah Kota Payakumbuh telah mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun kalau dilihat dari hasil jawaban responden, ada beberapa yang perlu ditingkatkan antara lain adalah pemisahan tugas dalam bekerja serta otorisasi oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pekerjaan.
4. Penelitian ini belum mengungkapkan seluruh variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehubungan dengan itu disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menindaklanjuti penelitian ini dengan memasukkan variabel-variabel lain yang belum diteliti.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G. R. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Grafindo.
- Alimbudiono, Sandra, R., & Andono, F. A. (2004). Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*, 05(02), 18–30.
- Hevesi, G. A. (2005). *Standards for Internal Control in New York State Government*.

- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008). Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir). *SNA XI Pontianak*.
- Jogiyanto, H. (2009). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kartika, J. C., & Budiono, E. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Implementasi Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia). *E-Proceeding of Management*, 02(03).
- Kharis, A. (2010). Pengaruh Kualitas Sumber Daya manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada PT. Avia Avian. *Skripsi, UPN Jawa T*.
- Mulyadi. (2007). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soimah, S. (2014). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara*. Universitas Bengkulu.
- Susanto, A. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Sutarman. (2009). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Warisno. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Wati, K. D., & Dkk. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal SI Akuntansi*, 02(01).
- Yosefrinaldi. (2013). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)*. Universitas Negeri Padang.
- Yudianta, I. G. A., & Erawati., N. M. A. (2012). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Universitas Udayana, Bali.
- Zuliarti. (2012). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Universitas Muh. Muria Kudus, Kudus.